



**RELEASE**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
KOMISI VIII DPR RI KE UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025  
13-15 NOVEMBER 2024**

=====

Pada tanggal 13-15 November 2014, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke UIN Sunan Ampel Surabaya. Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ini dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pembangunan kualitas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKIN) dan dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si. Kunjungan kerja spesifik ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil., Ph.D. beserta pejabat struktural dan sivitas akademika, yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Dr. Akhmad Sruji Bahtiar M.Pd.I. beserta jajaran. Temuan dan rekomendasi dari kunjungan kerja spesifik ini sebagai berikut:

**A. Temuan**

1. UIN Sunan Ampel Surabaya memfasilitasi lulusan pendidikan pesantren untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, buktunya UIN Sunan Ampel mengalokasikan beasiswa untuk lulusan pendidikan pesantren, walaupun yang merupakan lulusan pendidikan formal pesantren. Sementara yang lulusan pendidikan non formal pesantren belum difasilitasi.
2. UIN Sunan Ampel Surabaya belum dapat menjalankan bisnis sebagai salah satu sumber pendapatan, karena status kelembagaannya masih BLU, belum PTN-BH. Proses PTN-BH UIN Sunan Ampel Surabaya tersendat karena masih ada moratorium peningkatan status

BLU menjadi PTN-BH implikasi dari protes mahasiswa di seluruh perguruan tinggi negeri terhadap kenaikan UKT pada tahun 2023.

3. Di Jawa Timur terdapat kekurangan TPG. Tahun 2024 terdapat kekurangan sebesar Rp146.184.381.710. Kekurangan TPG tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp241.538.175.878. Hal ini telah diajukan kepada BPKP dan Ditjen Pendis Kementerian Agama. Sekarang pengajuan tersebut sedang dalam proses revidi oleh Ditjen Kementerian Agama. Selain itu, terdapat kekurangan Tukin di lingkungan madrasah dari tahun 2015-2022 sebesar Rp35.816.158.149. Kekurangan Tukin ini telah diajukan kepada Ditjen Pendis Kementerian Agama, walau hingga kini belum ada info lebih lanjut
4. Di Jawa Timur terdapat nomor porsi haji batu, yaitu 5.879 dan mereka mendaftar di bawah 1 Januari 2012.

## **B. Rekomendasi**

1. Praktik baik yang dilakukan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya dalam memfasilitasi lulusan pendidikan pesantren untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hendaknya juga diikuti oleh PTKIN yang lain.
2. Kementerian Agama hendaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mengupayakan pencabutan moratorium peningkatan status perguruan tinggi dari BLU menjadi PTN-BH.
3. Kementerian Agama harus berkoordinasi dengan BPKP dan Kementerian Keuangan untuk memenuhi kekurangan TPG dan Tukin di lingkungan Kementerian Agama.
4. Kementerian Agama harus segera menyelesaikan nomor porsi haji batu, karena dapat berkontribusi terhadap panjangnya daftar tunggu jemaah haji Indonesia.

Demikian *release* ini disampaikan sebagai gambaran pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Sunan Ampel Surabaya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Surabaya, 15 November 2024  
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI